

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi (terpusat) ke desentralisasi (otonomi daerah) mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di negeri ini. Dimana dahulunya masyarakat hanya ditempatkan sebagai pelaksana atau penerima manfaat program pembangunan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, tapi sekarang masyarakat diposisikan sebagai pelaku utama dalam pembangunan tersebut. Artinya pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam setiap kegiatan program pembangunan tersebut.

Berubahnya sistem pemerintahan tersebut menghasilkan paradigma baru pembangunan yaitu pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat dan menempatkannya sebagai objek sekaligus subyek pembangunan, lebih dikenal dengan sebutan pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif yaitu pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subyek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri. Perlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan-pelaksanaan-monitoring-evaluasi. Pengerahan massa (mobilisasi) diperlukan jika program berupa pada karya.

Menurut pada definisi pembangunan partisipatif tersebut terlihat bahwasanya masyarakat menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Artinya partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan tersebut. Menurut Mubyarto (1997) partisipasi merupakan kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Suhartanta (2001) memberikan definisi partisipasi sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu program/proyek, yang ikut mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif pembangunan dan pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya pembangunan yang mempengaruhinya.

Menurut Setiawan (2012) partisipasi sangat penting dan strategis bagi pembangunan diri dan aktivitas pembangunan pada umumnya. Conyers (1991) memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) Masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) Partisipasi merupakan hal demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan.

Ada banyak kegiatan pembangunan yang dilaksanakan terutama di tingkat desa/nagari yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan pendekatan partisipatif, diantaranya penyediaan air minum untuk masyarakat desa/nagari. Air minum dan air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat pedesaan dan perkotaan yang tidak bisa dikesampingkan sebagai bagian pembangunan pedesaan/perkotaan tersebut telah tercapai. Kebutuhan air bersih ini tidak hanya pemerintah Indonesia yang mengakui harus dapat terpenuhi untuk masyarakat pedesaan, namun dunia juga mengakui akan kebutuhan dan ketersediaan air bersih untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan.

Oleh karena itu pemerintah membuat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang telah dilaksanakan semenjak tahun 2008 sampai saat sekarang ini. Penyelenggaraan program PAMSIMAS dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Program ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam seluruh tahapan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pengoperasian dan pemeliharaan.

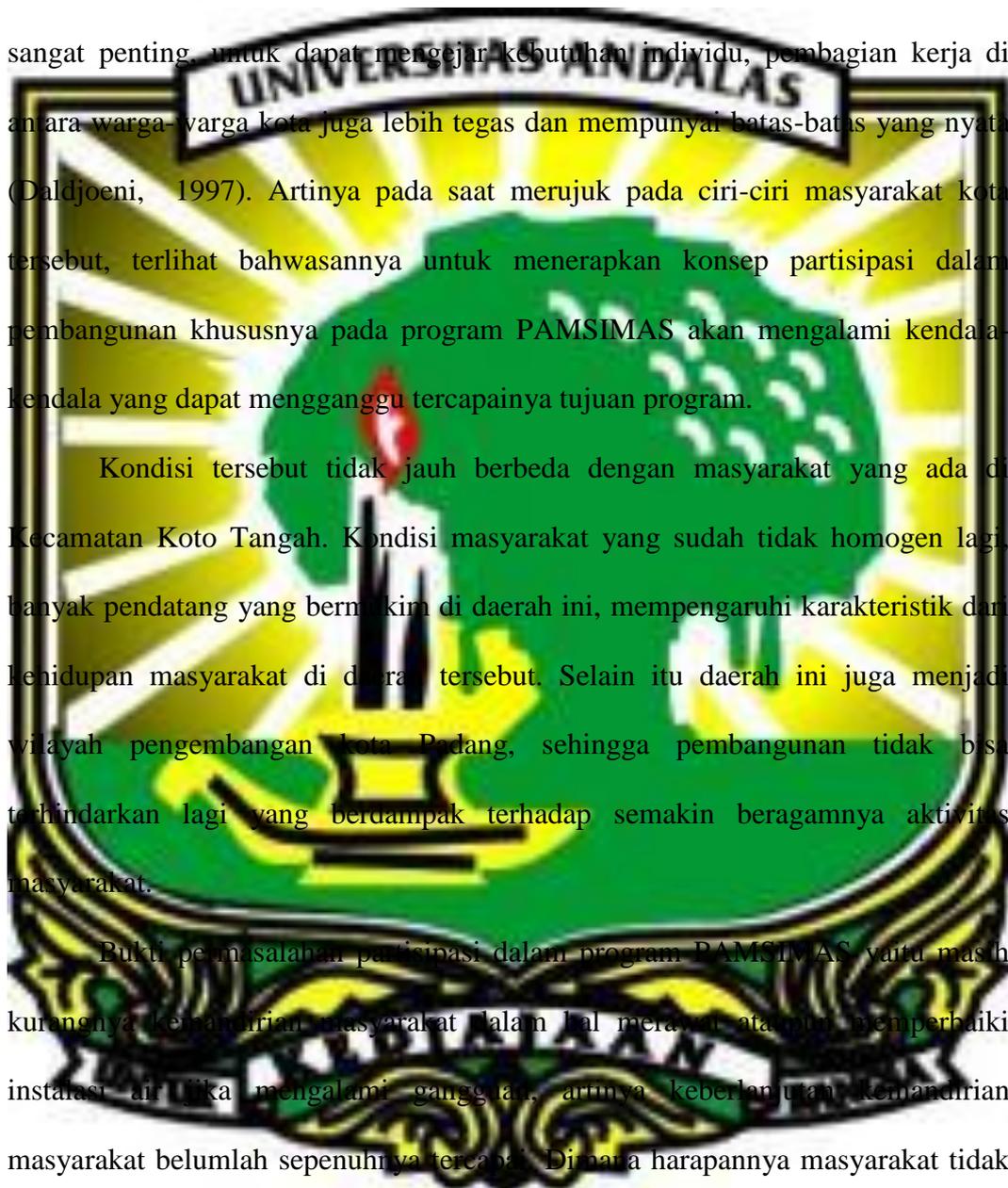
Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Program PAMSIMAS ini terdiri dari dua tahap, dimana tahap I dilaksanakan pada tahun 2008-2012 dan tahap II dilaksanakan pada tahun 2013-2016, dimana wilayah pelaksanaannya secara umum adalah seluruh desa yang ada di Indonesia tak terkecuali di Provinsi Sumbar. Kota Padang merupakan salah satu wilayah tempat pelaksanaan program PAMSIMAS. Terdapat sebanyak 7 kecamatan, 30 Kelurahan dan 47 lokasi sasaran wilayah pelaksanaan program PAMSIMAS I di Kota Padang. Dimana Kecamatan Koto Tengah merupakan wilayah terbanyak memiliki lokasi sasaran yaitu sebanyak 13 lokasi, dengan jumlah KK yang terlayani sebanyak 1252 KK (PAMSIMAS tahun 2012).

Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat yang jelas nyata masyarakatnya hidup dalam kondisi keberagaman. Selain itu ciri-ciri masyarakat kota adalah lebih mandiri. Interaksi yang terjadi lebih banyak berdasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi, Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk dapat mengejar kebutuhan individu, pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata (Daldjoeni, 1997). Artinya pada saat merujuk pada ciri-ciri masyarakat kota tersebut, terlihat bahwasannya untuk menerapkan konsep partisipasi dalam pembangunan khususnya pada program PAMSIMAS akan mengalami kendala-kendala yang dapat mengganggu tercapainya tujuan program.

Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Koto Tangah. Kondisi masyarakat yang sudah tidak homogen lagi, banyak pendatang yang bermukim di daerah ini, mempengaruhi karakteristik dari kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Selain itu daerah ini juga menjadi wilayah pengembangan kota Padang, sehingga pembangunan tidak bisa dihindarkan lagi yang berdampak terhadap semakin beragamnya aktivitas masyarakat.

Rukit permasalahan partisipasi dalam program PAMSIMAS yaitu masih kurangnya kemandirian masyarakat dalam hal merawat ataupun memperbaiki instalasi air jika mengalami gangguan, artinya keberlanjutan kemandirian masyarakat belumlah sepenuhnya tercapai. Dimana harapannya masyarakat tidak hanya terlibat sampai pelaksanaan pembangunan infrastruktur air minum, melainkan masyarakat juga diharapkan partisipasinya pasca pembangunan sarana dan prasarana air minum di daerahnya seperti partisipasi masyarakat untuk



menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang telah dibangun melalui program PAMSIMAS tersebut (hasil wawancara dengan koordinator PAMSIMAS pusat).

Oleh karena itu ada kejanggalan dari harapan dan kenyataan terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PAMSIMAS tersebut yang dilaksanakan di Kota Padang. Menurut Oppenheim dalam Setiawan (2012) terjadinya partisipasi dari individu masyarakat jika, (1) ada unsur yang mendukung dalam diri seseorang yaitu kemauan dan kemampuan berpartisipasi; (2) terdapat iklim atau lingkungan yang memungkinkan terjadinya perilaku (partisipasi).

Merujuk pada pendapat Setiawan (2012) kurangnya partisipasi masyarakat pada umumnya dalam program pembangunan dipengaruhi oleh; (1) seberapa kuat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kelembagaan dan modal-modal sosial yang menjadi atributnya; (2) secara sosial ekonomi, adakah keterkaitan antara kegiatan dengan *felt need* dan *real need* masyarakat; (3) seberapa efektifnya komunikasi dan koordinasi kegiatan; (4) adakah kebebasan (demokrasi) bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PAMSIMAS sangat menentukan keberlanjutan yang diharapkan oleh program ini. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan penelitian untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat nagari dalam pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan deskripsi di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan topik utama yang akan dibahas dan ungkap dalam penelitian ini adalah “Seberapa Besar Tingkat dan Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pamsimas dan hubungannya dengan keberlanjutan yang diharapkan oleh program Pamsimas di Kota Padang”.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas adalah:

- 1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program PAMSIMAS di Kecamatan Koto Tangah ?
- 2) Apa faktor-faktor pendorong masyarakat berpartisipasi dalam program PAMSIMAS di Kecamatan Koto Tangah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- 1) Mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Pamsimas di Kecamatan Koto Tangah.
- 2) Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong masyarakat berpartisipasi dalam program PAMSIMAS di Kecamatan Koto Tangah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

- 1) Bagi penulis bermanfaat sebagai pendalaman pemahaman mengenai teori partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, konsep partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan bidang kerja penulis sebagai aparatur pemerintahan yang sering melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kedinasan.
- 2) Untuk pemerintah terutama Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang selaku penanggungjawab kegiatan program PAMSIMAS, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan mereka dalam hal mengatasi

permasalahan keberlanjutan ketersediaan air minum masyarakat nagari pasca dilaksanakannya program PAMSIMAS tersebut.

- 3) Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan tambahan atau masukan atau pijakan mereka untuk melakukan penelitian yang terkait dengan topik yang penulis buat.



